



**LAPORAN  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG KESEHATAN  
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam 20514 Telp/Fax. (061) 7951849  
e-Mail: [dinkes@deliserdangkab.go.id](mailto:dinkes@deliserdangkab.go.id) Website: <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 dapat kami susun dan diselesaikan dengan baik.

Pencapaian penerapan SPM Bidang Kesehatan merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah melakukan program/kegiatan untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang mencakup 12 jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 ini tidak terlepas dari kerjasama Tim yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian kita terhadap penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Masukan dan saran yang membangun masih sangat kami butuhkan dalam rangka kesempurnaan penyajian laporan ini. Salam Deli Serdang SEHAT.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Lubuk Pakam, Maret 2020  
**Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Deli Serdang**

**dr. Ade Budi Krista**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19710313 200701 1 026**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.   LATAR BELAKANG.....	1
B.   DASAR HUKUM .....	2
1.3. KEBIJAKAN UMUM .....	3
1.4. ARAH KEBIJAKAN.....	3
<b>BAB II     PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM .....</b>	<b>5</b>
A.   JENIS PELAYANAN DASAR .....	5
B.   TARGET PENCAPAIAN SPM.....	6
C.   REALISASI.....	6
D.   ALOKASI ANGGARAN.....	12
E.   DUKUNGAN PERSONIL.....	12
F.   PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	16
<b>BAB III    PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>28</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.....	7
Tabel 2.2	Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Menurut Sumber Dana Tahun 2019.....	12
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.....	14
Tabel 2.4	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.....	16
Tabel 3	Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019.....	24



## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan kesehatan. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan ke enam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pencapaian target SPM juga diarahkan kepada kinerja Pemerintah Daerah, menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara.

Sesuai dengan Pasal 20 dan 21 Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran



berakhir sesuai dengan format laporan penerapan SPM daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melaporkan Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);



5. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 03); dan
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 Nomor 26).

### **C. KEBIJAKAN UMUM**

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya target SPM yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mencapai sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan dengan strategi Optimalisasi Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Berkelanjutan dengan arah kebijakannya Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan diharapkan dapat memenuhi mutu dan jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan.

### **D. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang dituangkan dalam



Kebijakan Umum APBD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Arah kebijakan digunakan untuk memperjelas waktu pencapaian sasaran dan menghubungkan setiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan yang difokuskan guna:

1. Memajukan dan memantapkan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, perdagangan dan jasa, pertanian, industri, serta menciptakan peluang berusaha dan kesempatan untuk bekerja; dan
3. Mewujudkan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah destinasi yang aman dan nyaman, kota yang cerdas, religius dan berdaya saing, memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Pada tahun 2019, belanja daerah Kabupaten Deli Serdang diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Secara garis besar belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.



Belanja penyelenggaraan urusan wajib diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Deli Serdang.



## BAB II

# PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

### A. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan daerah Kabupaten terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ);
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.



## **B. TARGET PENCAPAIAN SPM**

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan harus 100% (seratus persen).

## **C. REALISASI**

Realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.1**  
**Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Definisi Operasional	Target 2019	Rumus Perhitungan Kinerja	Capaian 2019	
					Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	45.477	93,04
				Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	48.877	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	44.659	95,72
				Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	46.656	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Definisi Operasional	Target 2019	Rumus Perhitungan Kinerja	Capaian 2019	
					Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	42.186	94,94
				Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	44.434	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	165.901	93,83
				Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	176.812	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	34.950	100,00



No	Jenis Pelayanan Dasar	Definisi Operasional	Target 2019	Rumus Perhitungan Kinerja	Capaian 2019	
					Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	34.950	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang berusia 15 - 59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	922.744	65,78
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.402.826	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	148.005	99,83
				Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	148.256	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Definisi Operasional	Target 2019	Rumus Perhitungan Kinerja	Capaian 2019	
					Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	394.535	81,41
				Jumlah estimasi penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	484.647	
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	35.433	91,83
				Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	38.587	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Definisi Operasional	Target 2019	Rumus Perhitungan Kinerja	Capaian 2019	
					Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ Berat yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.552	83,02
				Jumlah ODGJ Berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerjakab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.074	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	22.224	87,55
				Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama	25.385	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	41.929	70,11
				Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	59.805	



#### D. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2019 di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan berjumlah Rp. 145.962.226.505,00 Besarannya alokasi anggaran menurut sumber dana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Menurut Sumber Dana Tahun 2019**

Sumber Dana	Jumlah (Rp)	%
1. APBD Kabupaten	<b>139.416.375.331</b>	<b>76,82</b>
2. APBN, terdiri dari:		
2.1. DAK Fisik	<b>10.390.298.000</b>	<b>5,73</b>
2.2. DAK Non Fisik, terdiri dari:		
- Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	<b>27.760.050.000</b>	<b>15,3</b>
- Jaminan Persalinan (Jampersal)	<b>3.918.000.000</b>	<b>2,16</b>
3. (Sumber Dana Lain yang Sah)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>181.484.723.331</b>	<b>100</b>

#### E. DUKUNGAN PERSONIL

Proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang tersebar di 22 Kecamatan dengan rincian 27 unit Puskesmas Rawat Inap dan 7 (tujuh) unit Puskesmas Rawat Jalan pada tahun 2019. Selain itu di 22 kecamatan juga tersebar 110 Puskesmas Pembantu dan 159 Pos Kesehatan Desa. Bahkan pada tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sedang mempersiapkan sebanyak 2 (dua) Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Pancur Batu untuk ditingkatkan menjadi Rumah



Sakit (RS) Kelas D Pratama di Kecamatan Bangun Purba dan Kelas D di Kecamatan Pancur Batu dengan terlebih dahulu mempersiapkan Puskesmas pengganti di wilayah tersebut yaitu peningkatan Puskesmas Pembantu Tuntungan Kecamatan Pancur Batu menjadi Puskesmas dan membangun Puskesmas baru di Kecamatan Bangun Purba.

Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk menggambarkan daya keterjangkauan pelayanan kesehatan di suatu daerah terhadap penduduknya. Berdasarkan ketetapan Kementerian Kesehatan, standar rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1:30.000. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 34 unit dan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 sebanyak 2.195.709 jiwa, maka rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 adalah 0,46 yang berarti 1 (satu) Puskesmas melayani lebih dari 30.000 penduduk.

Jumlah pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan seluruh UPT Dinas tahun 2019 sebanyak 2.465 orang dengan perincian 2.440 berstatus PNS (99,9%) dan 25 orang merupakan Non PNS/honor (0,01%). Sedangkan berdasarkan pendidikan formalnya, pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan seluruh UPT Dinas terdiri dari Sarjana Muda/Diploma (D3) sebanyak 1.347 orang (54,65%); Sarjana (Strata 1 dan 2 serta D4) sebanyak 705 orang (28,6%); SMA sebanyak 273 orang (11,08%); SMP sebanyak 10 orang (0,41%) dan SD berjumlah 1 orang (0,04%). Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan UPT Dinas dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang**  
**Tahun 2019**

No	Unit Kerja	Laki-laki								Perempuan							
		S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD	S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD
1	Puskesmas Gunung Meriah	0	5	0	1	0	0	0	0	0	4	0	22	4	0	0	0
2	Puskesmas Tiga Juhar	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	41	2	4	0	0
3	Puskesmas Sibolangit	0	4	0	0	0	1	0	0	0	16	4	26	0	5	0	0
4	Puskesmas Bandar Baru	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	5	25	0	6	0	0
5	Puskesmas Kutalimbaru	0	4	0	1	0	2	1	0	0	11	5	36	3	7	0	0
6	Puskesmas Pancur Batu	0	4	0	3	0	3	0	0	1	19	7	53	3	19	0	0
7	Puskesmas Gunung Tinggi	1	2	0	1	0	0	0	0	0	13	5	16	4	13	0	0
8	Puskesmas Namorambe	0	1	0	2	0	1	0	0	0	17	4	82	2	6	0	0
9	Puskesmas Biru-Biru	0	3	0	0	0	2	0	0	2	14	0	49	3	7	0	0
10	Puskesmas Talun Kenas	0	3	0	1	0	0	1	0	0	8	1	43	0	9	0	0
11	Puskesmas Bangun Purba	0	2	0	0	0	1	0	0	0	9	6	32	3	5	0	0
12	Puskesmas Galang	0	2	0	0	0	1	0	0	0	9	2	41	1	7	0	0
13	Puskesmas Petumbukan	0	2	0	1	0	0	0	0	0	6	2	28	2	4	0	0
14	Puskesmas Tanjung Morawa	0	2	0	0	0	1	0	0	0	18	5	49	11	4	0	0
15	Puskesmas Dalu Sepuluh	0	2	0	1	0	1	0	0	1	9	9	36	5	21	0	0
16	Puskesmas Patumbak	1	2	0	1	0	0	1	0	0	10	7	42	9	4	0	0
17	Puskesmas Delitua	0	5	0	1	0	0	0	0	1	11	6	26	10	7	0	0
18	Puskesmas Mulyorejo	0	2	0	1	0	1	0	0	0	20	2	36	18	7	0	0
19	Puskesmas Sei Mencirim	0	3	0	1	0	1	0	0	1	18	1	34	20	9	0	0



No	Unit Kerja	Laki-laki								Perempuan							
		S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD	S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD
20	Puskesmas Sei Semayang	1	2	0	0	0	0	0	0	2	9	4	19	0	3	0	0
21	Puskesmas Hamparan Perak	2	2	0	3	0	0	0	0	3	14	10	56	3	9	0	0
22	Puskesmas Kota Datar	0	3	0	2	0	1	0	0	0	5	0	29	3	2	0	0
23	Puskesmas Labuhan Deli	0	5	0	1	0	0	0	0	0	12	1	36	2	1	0	0
24	Puskesmas Pematang Johar	1	3	0	4	0	1	0	0	1	10	0	34	0	1	0	0
25	Puskesmas Bandar Khalipah	1	4	0	0	0	1	0	0	1	15	1	50	3	6	0	0
26	Puskesmas Kenangan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	14	1	55	0	9	0	0
27	Puskesmas Tanjung Rejo	1	2	0	3	0	4	0	0	2	11	9	49	6	6	0	0
28	Puskesmas Batang Kuis	0	3	0	1	0	1	0	0	0	16	4	45	2	6	1	0
29	Puskesmas Pantai Labu	0	1	0	3	0	2	0	0	0	5	0	43	1	1	0	0
30	Puskesmas Araskabu	0	1	0	1	0	1	0	0	0	10	3	22	3	6	0	0
31	Puskesmas Karang Anyer	0	2	0	0	0	2	0	0	0	5	1	24	0	4	0	0
32	Puskesmas Pagar Jati	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	2	33	0	5	0	0
33	Puskesmas Lubuk Pakam	0	2	0	0	0	1	0	0	0	13	2	42	6	9	0	0
34	Puskesmas Pagar Merbau	1	1	0	0	0	1	0	0	1	7	7	35	0	9	0	0
35	Dinas Kesehatan	3	24	0	3	0	11	4	1	26	36	1	15	0	6	0	0
36	UPT. Labkesda	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
37	UPT. Instalasi Farmasi	0	1	0	1	0	1	2	0	0	1	0	4	0	2	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>418</b>	<b>117</b>	<b>1310</b>	<b>129</b>	<b>229</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



## F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sasaran ibu hamil tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dikarenakan tingkat mobilitas penduduk Deli Serdang yang sangat tinggi (sering berpindah-pindah) sehingga data tidak akurat	Data sasaran disesuaikan dengan jumlah ibu hamil di lapangan	Pro aktif dalam melakukan pemutakhiran data dari seluruh jejaring Puskesmas	Kurangnya laporan dari jejaring Puskesmas	Koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan	Membuat pertemuan yang mengundang jejaring Puskesmas untuk membahas pelaporan ANC			



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
		Kurangnya sarana pendukung pemeriksaan Antenatal Care (ANC)	Melengkapi sarana pendukung pemeriksaan ANC	Membuat usulan pengadaan alat pemeriksaan ANC	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ANC	Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas	Melaksanakan kelas ibu hamil di Puskesmas			
		Kompetensi bidan di desa yang masih belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan penyegaran terhadap Tata laksana Antenatal care sesuai Standar 10T	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas bidan di desa	Pelatihan, uji kompetensi dan peningkatan kapasitas bidan di desa						



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Belum berjalannya Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan baik	Meningkatkan pemanfaatan Buku KIA/penempelan Stiker P4K	Mengevaluasi pemanfaatan penempelan Stiker P4K	Masih adanya Klinik Bersalin Swasta yang tidak melaporkan pencatatan dan pelaporan persalinan yang sudah ditolongnya	Permintaan laporan KIA Ke Klinik Bersalin Swasta.	Bidan koordinator (Bikor) membuat jadwal rutin untuk pertemuan dengan Klinik Bersalin Swasta di wilayah kerjanya.	Masih kurangnya dana untuk peningkatan kapasitas/kompetensi bidan penanggung jawab desa mengenai Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Tambahan dana untuk kegiatan peningkatan kapasitas/kompetensi bidan penanggung jawab desa mengenai Program KIA.	Mengusulkan tambahan pengajuan dana dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas/kompetensi bidan penanggung jawab desa mengenai Program KIA.
		Penggunaan Kantong Persalinan Belum Optimal	Penekanan ke bidan penanggung jawab Penggunaan Kantong Persalinan	Mengevaluasi pemanfaatan Kantong Persalinan	Masih rendahnya dukungan keluarga terhadap ibu bersalin	Peningkatan pengetahuan kepada keluarga mengenai persalinan yang aman dan baik	Melakukan Kelas Ibu Hamil dengan intensitas lebih baik lagi	Masih kurangnya dana untuk melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil	Tambahan dana untuk Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	Mengusulkan tambahan pengajuan dana dalam Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
					Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan masa nifas yang ketiga (29-42 hari setelah melahirkan)	Kunjungan petugas ke rumah ibu nifas	Meningkatkan kunjungan petugas ke rumah ibu nifas			



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL)				Masih rendahnya kemauan ibu untuk membawa BBL ke faskes	Kunjungan ke rumah ibu BBL oleh petugas kesehatan	Melakukan kunjungan ke rumah ibu BBL oleh petugas kesehatan	Masih kurangnya dana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Kelas Ibu dan Kunjungan Neonatus	Tambahan dana untuk Pelaksanaan Kelas Ibu dan Kunjungan Neonatus yang akan dilaksanakan di setiap desa	Mengusulkan tambahan pengajuan dana untuk Pelaksanaan Kelas Ibu dan Kunjungan Neonatus
						Intensitas frekuensi Kelas Ibu Hamil	Meningkatkan frekuensi Kelas Ibu Hamil			
4	Pelayanan Kesehatan Balita				Masih rendahnya kunjungan Balita ke Posyandu	Kegiatan inovasi yang dapat meningkatkan minat ibu yang memiliki balita untuk membawa Balitanya ke Posyandu	Membuat inovasi yang dapat meningkatkan minat ibu yang memiliki balita untuk membawa Balitanya ke Posyandu	Masih kurangnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Balita.	Tambahan dana untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Balita	Mengusulkan tambahan pengajuan dana untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Balita
					Masih kurangnya dukungan dan peran dari Keluarga dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan Balita	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Keluarga dan lintas sektor mengenai peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan Balita	Melibatkan keluarga dan lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Balita.			



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kurangnya jadwal kunjungan petugas kesehatan ke sekolah	Membuat jadwal rutin ke sekolah oleh petugas.	Membuat rencana kegiatan ( <i>Plans of Actions</i> ) Program UKS.	Masih rendahnya kerja sama petugas dengan pihak sekolah dalam kegiatan anak usia pendidikan dasar	Penjadwalan kunjungan dengan pihak sekolah oleh petugas kesehatan	Membuat jadwal rutin pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar ke sekolah	Masih kurangnya dana pelaksanaan kunjungan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar ke sekolah	Tambahan dana untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar ke sekolah	Mengusulkan tambahan pengajuan dana untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar ke sekolah
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				Masih rendahnya kemauan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan	Penyuluhan kepada masyarakat agar mau melakukan pemeriksaan	Melakukan kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi masyarakat			
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Belum sesuai jumlah Posyandu Lansia dengan sasaran Lansia yang ada	Sosialisasi dengan masyarakat dan lintas sektor untuk membentuk Posyandu Lansia.	Membuka Posyandu Lansia baru di desa sesuai dengan jumlah sasaran Lansia agar pelayanan bagi lansia dapat merata	Masih rendahnya minat Lansia berkunjung ke Posyandu Lansia	Kerja sama dengan Badan Desa dan Lintas Sektoral	Membuat jadwal pertemuan untuk pembahasan mengenai capaian kunjungan Lansia di Posyandu	Masih kurangnya dukungan dana dalam kegiatan kunjungan <i>Home Care</i> Lansia Resti	Pengajuan Program Lansia yaitu <i>Home Care</i> Lansia Resti	Mengajukan kegiatan Program Lansia yaitu <i>Home Care</i> Lansia Resti



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
		Masih kurangnya Lansia Kit dan Buku Kesehatan Lanjut Usia dalam Kegiatan Posyandu Lansia	Pengajuan Kebutuhan Lansia Kit dan Buku Kesehatan Lanjut Usia	Mengajukan pengadaan barang untuk kebutuhan Lansia Kit dan Buku Kesehatan Lanjut Usia	Masih kurangnya kepedulian lintas sektor untuk capaian Program Lansia	Melibatkan lintas sektor dalam kegiatan Program Lansia	Membuat jadwal pertemuan untuk pembahasan mengenai capaian kunjungan Lansia dengan lintas sektor	Masih terbatasnya dana untuk mendukung Program Lansia	Pengajuan dana untuk kebutuhan Program Lansia	Mengajukan kebutuhan dana Program lansia
					Masih kurangnya dukunagn lintas sektor dalam penambahan Posyandu Lansia baru	Kerjasama dengan Pihak Kecamatan/Desa untuk membuka Posyandu Lansia yang baru.	Mengajukan ke pemangku jabatan di kecamatan/desa untuk membuka Posyandu Lansia yang baru.	Masih kurangnya dana untuk pengadaan Lansia Kit dan Buku Kesehatan Lansia	Pengajuan dana untuk pengadaan Lansia Kit dan Buku Kesehatan Lansia	Mengajukan kebutuhan dana untuk Lansia Kit dan Buku Kesehatan Lansia
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Masih kurangnya pemahaman petugas kesehatan mengenai definisi operasional	Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan mengenai definisi operasional	Melakukan technical update untuk petugas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Pencatatan dan pelaporan yang masih rendah	Melakukan pelayanan kesehatan Hipertensi sesuai dengan SOP	Melakukan koordinasi lintas sektor	Dana yang terbatas untuk pemeriksaan Hipertensi sesuai standar	Pengajuan dana untuk pemeriksaan Hipertensi sesuai standar	Mengajukan kebutuhan dana untuk pemeriksaan Hipertensi sesuai standar



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (DM)				Pencatatan dan pelaporan yang masih rendah	Melakukan pelayanan kesehatan DM sesuai dengan SOP	Melakukan koordinasi lintas sektor	Kurangnya bahan medis habis pakai untuk pemeriksaan kadar gula darah	Menambah ketersediaan bahan medis habis pakai	Membuat usulan bahan medis habis pakai sehingga ditampung dalam Rencana Kebutuhan Obat (RKO)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				Masih kurangnya pelaporan data pelayanan ODGJ dari jejaring Puskesmas	Koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaporan dari jejaring Puskesmas yang berdampak pada pencabutan izin operasional			
					Masih kurangnya peran serta aktif masyarakat dan keluarga penderita ODGJ karena rasa malu masyarakat untuk memeriksakan anggota	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap ODGJ	Memberikan informasi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa			



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
					keluarga yang ODGJ					
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB				Petugas untuk Aplikasi Sistem Informasi TB (SITB) di pelayanan kesehatan swasta sering berganti	Penguatan komitmen untuk melaksanakan TB-DOTS	Melakukan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan swasta dimana pengisian aplikasi SITB sebagai salah satu syarat pengurusan izin			
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV				Kurangnya koordinasi antar pengelola program dalam pelaporan HIV	Meningkatkan koordinasi antar pengelola program dalam pelaporan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Membuat perencanaan terpadu untuk menyinergikan program kesehatan ibu dan program HIV	Kurangnya rapid test untuk melakukan pemeriksaan skrining HIV	Tambahan dana untuk pengadaan rapid test pemeriksaan skrining HIV	Mengusulkan tambahan dana untuk pengadaan rapid test pemeriksaan skrining HIV





### BAB III

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang tercantum pada dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3**  
**Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019**

No	Program	Kegiatan
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan BCTLS ( <i>Basic Trauma Life Support and Basic Cardiac Life Support</i> ) bagi Tenaga Kesehatan
		Pelatihan ATCLS ( <i>Advance Trauma Cardiac Life Support</i> ) bagi Tenaga Kesehatan
2	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)
		Pelatihan Asuhan Persalinan Normal
		Operasional Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
		Operasional Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		Manajemen Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal)
		Pelayanan Kesehatan Rujukan
Integrasi Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) ke APBD Kabupaten		
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan



No	Program	Kegiatan
		Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD, SMP, dan SMA Sederajat
		Penyuluhan Kesehatan dengan Obrolan Interaktif melalui Radio
		Pekan Promosi Kesehatan
		Pembinaan Desa Siaga Aktif
		Lomba Desa BerPHBS tingkat Kabupaten
		Pelatihan Kader Kesehatan di Sekolah
		Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah
		Pembinaan Posyandu
		Pembinaan Desa ber-LBS (Lingkungan Bersih Sehat)
		Peningkatan Kesehatan Melalui Pendekatan Keluarga
		Pelayanan Kesehatan Olahraga
		Pelayanan Kesehatan Melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
		Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Pemantauan Pemantauan Pertumbuhan Balita
		Gerakan Nasional Sadar Gizi untuk Menunjang 1.000 Hari Pertama Kehidupan
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat dengan Metode Community-Led Total Sanitation (CLTS)/Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
		Pengawasan Sanitasi Dasar Pondok Pesantren
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Peningkatan Imunisasi



No	Program	Kegiatan
		Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		Sosialisasi Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di Masyarakat
		Pelatihan Klinik Infeksi Menular Seksual (IMS)
		Sosialisasi Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular Bagi Masyarakat
		Sosialisasi IMS dan HIV/AIDS ke SMP/SMA Sederajat
		Surveilans deteksi dini kanker Leher Rahim dan Payudara
		Workshop Bagi Petugas Mikroskop Puskesmas
		Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji
		Pemantapan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) Penyakit Menular Potensi KLB
		Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Diare
		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ISPA
		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan IMS/HIV/AIDS
		Pelayanan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
		Pelayanan Kesehatan Jiwa
8	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pengadaan Puskesmas Keliling
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
9	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
		Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak



No	Program	Kegiatan
		Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), dan Integrasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pembinaan Bidan Penanggungjawab Desa
		Seminar Pola Asuh Anak
		Workshop Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDIDTKB)
		Pertemuan Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA0)
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)
		Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Lansia
11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Penatalaksanaan Rujukan Ibu Hamil dengan Pendarahan, Pre Eklamsi, dan Infeksi
		Operasional Kegiatan Jaminan Persalinan
		Pertemuan Peningkatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
		Pertemuan Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)
		Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Kohort Ibu
		Pemantauan Kasus Rujukan di Wilayah Kerja
12	Program Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Kesehatan



## BAB IV

## PENUTUP

Dalam menerapkan dan mencapai SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep standar pemenuhan mutu dan jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan, juga diperlukan Tim Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang bertugas untuk:

1. Menyusun rencana aksi penerapan SPM Bidang Kesehatan yang mencakup 12 jenis pelayanan dasar, yaitu:
    - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
    - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
    - d. Pelayanan kesehatan balita;
    - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
    - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
    - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
    - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
    - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
    - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
    - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
    - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.



2. Melakukan koordinasi lintas program/sektor terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan;
3. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM Bidang Kesehatan secara periodik;
4. Mengoordinasikan integrasi SPM Bidang Kesehatan ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM Bidang Kesehatan terintegrasi ke dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan integrasi SPM Bidang Kesehatan ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM Bidang Kesehatan terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Deli Serdang.
6. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
7. Mengoordinasikan perumusan strategi pemenuhan penerapan SPM Bidang Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
8. Melakukan sosialisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
9. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi; dan
10. Mengoordinasikan dan menganalisis pencapaian penerapan SPM Bidang Kesehatan sebagai dasar untuk perencanaan (pemetaan target) tahun berikutnya.



Pembentukan Tim Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat berfungsi dengan baik sehingga kebutuhan standar mutu dan jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dapat dianggarkan, dilaksanakan dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Demikian penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 kami laporkan sebagai wujud tanggung jawab kami dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud di Kabupaten Deli Serdang.

Salam Deli Serdang SEHAT.

Lubuk Pakam,     Maret 2020

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Deli Serdang**

**dr. Ade Budi Krista  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710313 200701 1 026**